

Strategi Advokasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan

Ela Sarlita Fitri Widyastuti¹,
Zahrina Roseliana Mazidah²

¹⁾ Program Studi D III Perpustakaan, Universitas Sebelas Maret

²⁾ Program Studi D III, Universitas Sebelas Maret

DOI: <http://journals.usm.ac.id/index.php/jisl>

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Disubmit

1 Juni 2026

Direvisi

9 Juni 2026

Disetujui

9 Juni 2026

Keywords:

*advocacy, social
inclusion-based library
transformation*

Abstrak

Advokasi adalah upaya mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Demi mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu dilakukan advokasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi advokasi yang dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi partisipatif aktif, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten telah melakukan strategi advokasi dengan baik. Terdapat lima poin yang diperhatikan dalam melakukan advokasi, antara lain membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, melakukan pelibatan masyarakat, menyebarluaskan informasi terkait transformasi perpustakaan, melakukan kerja sama dengan lembaga lain serta dapat menunjukkan hasil positif dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pelaksanaan advokasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terdapat kendala yang dihadapi, antara lain sumber daya manusia, waktu pelaksanaan, serta belum tersampainya informasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Abstract

Advocacy is an effort to influence decision-making by stakeholders. In order to support the social inclusion-based library transformation program, advocacy is necessary. This research aims to find out how the advocacy strategy carried out by the Magetan Archives and Library Office in implementing the social inclusion-based library transformation program. The research method used is qualitative method. The data collection techniques used are active participatory observation, semi-structured interviews and documentation. The results obtained from this study are that the Regency Archives and Library Office has carried out a good advocacy strategy. There are five points that are considered in conducting advocacy, including building effective communication with the community, conducting community involvement, disseminating information related to library transformation, collaborating with other institutions and being able to show positive results from social inclusion-based library transformation. The implementation of advocacy for library transformation programs based on

social inclusion has obstacles, including human resources, implementation time, and information has not been conveyed to all levels of society.

✉ Alamat Korespondensi: Universitas Sebelas Maret
E-mail: zahrinaroselianamazi@staff.uns.ac.id

e-ISSN: 2723-2778

PENDAHULUAN

Masyarakat saat ini dapat memanfaatkan layanan akses informasi yang ada di perpustakaan melalui berbagai program yang ada. Salah satu program yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional adalah Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Program ini mulai dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2018 berdasarkan yang disebutkan oleh Pratiwi (2020). Tujuan dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan perpustakaan serta meningkatkan pemanfaatan layanan perpustakaan oleh masyarakat berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.3 (2023). Program transformasi perpustakaan dapat berjalan dengan baik apabila terjalin kerja sama antara perpustakaan dengan masyarakat, hal ini dikarenakan perpustakaan menjadi tempat berkegiatan dan berkarya masyarakat secara beragam (Mahdi, 2020). Kegiatan yang dilakukan masyarakat di perpustakaan dapat berupa kegiatan pengembangan potensi, seperti pelatihan kepenulisan, penyuluhan kesehatan, pelatihan wirausaha dan lain-lain. Perpustakaan sebagai tempat untuk masyarakat berkarya memberikan tempat tanpa adanya batasan sosial, agama, ras dan kondisi fisik.

Demi mensukseskan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Perpustakaan Nasional perlu menjalin kerja sama untuk menjangkau masyarakat lebih luas. Kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi solusi untuk mensukseskan program ini. Seperti yang terdapat dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 bahwa Perpustakaan Nasional menyertakan perpustakaan provinsi dan perpustakaan kabupaten/kota dalam program ini. Salah satu perpustakaan kabupaten/kota yang telah melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2020 hingga saat ini dengan berbagai rangkaian kegiatan. Dari beberapa kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang ada perlu disampaikan kepada masyarakat. Hal tersebut karena masyarakat adalah sasaran dari program ini. Demi berjalannya program ini, perpustakaan perlu melakukan advokasi. Dimana advokasi adalah bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan seperti yang ada dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.3 (2023). (Ilmi & Husna, 2019) menjelaskan bahwa advokasi merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan kegiatan di perpustakaan. Dukungan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga dan juga masyarakat.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dan kendala dalam pelaksanaan program tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui startegi advokasi program transformasi perpustakaan berbasis

inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dan kendala dalam pelaksanaan program tersebut serta sebagai referensi bagi dinas perpustakaan daerah lain dalam melaksanakan tanggung jawab advokasi dalam melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini adalah oleh Rachman dkk (2019) dengan judul “Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang)”. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan Perpustakaan Desa Gampingan dalam melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hasil dari penelitian tersebut adalah Perpustakaan Desa Gampingan sukses melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pemustaka, memberikan fasilitas kegiatan untuk masyarakat, melakukan advokasi, melakukan monitoring supaya dapat melihat dampak dari kegiatan transformasi perpustakaan, menyediakan koleksi bacaan, memberikan pelatihan untuk masyarakat serta perpustakaan menjadi Rumah Edukasi Lingkungan. Dari penelitian terdahulu tersebut disampaikan bahwa Perpustakaan Desa Gampingan dapat sukses melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan salah satu strategi yang dilakukan adalah advokasi. Karena melakukan advokasi, maka penelitian terdahulu ini dapat menjadi referensi peneliti dalam melakukan penulisan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mhd. Ardi Wiranda, Ninis Agustina dan Rully Khairul Anwar (2022) dengan judul “Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (Studi Kasus di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Siak)” terdapat empat strategi dalam melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Empat strategi tersebut adalah melakukan analisis lingkungan, perumusan strategi, implementasi strategi serta melakukan evaluasi strategi dan pengendalian strategi. Dalam melakukan perumusan strategi terdapat terdapat tiga perencanaan yaitu meningkatkan layanan teknologi informasi dan komunikasi, pelibatan masyarakat dan advokasi. Advokasi dilakukan dengan cara promosi, kemitraan dan publikasi kegiatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Wiranda dkk (2022) menunjukkan hasil peningkatan layanan teknologi informasi dan komunikasi, melakukan pelibatan masyarakat, melakukan advokasi. Advokasi yang dilakukan adalah dengan cara promosi, kemitraan dan publikasi kegiatan yang akan dilakukan dan yang telah dilaksanakan. Strategi ketiga adalah implementasi dari strategi itu sendiri. Kegiatan yang dilakukan dalam implementasi strategi adalah melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan tersebut, kemudian melakukan kegiatan replikasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu sosialisasi dan bimbingan teknis, stakeholder meeting, dan peer learning meeting serta melakukan evaluasi. Strategi yang keempat adalah melakukan evaluasi dan pengendalian strategi. Dari penelitian terdahulu tersebut disampaikan terkait advokasi yang dilakukan adalah dengan promosi kemitraan dan publikasi, dimana hal tersebut dapat mendukung karena memiliki poin kesamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

Unsur kebaruan dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah terletak pada fokus penelitiannya, yaitu pada strategi advokasi pelaksanaan program transformasi

perpustakaan berbasis inklusi sosial. Pada penelitian terdahulu advokasi menjadi salah satu poin strategi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, namun pada penelitian ini fokus pada advokasi saja. Pada perpustakaan yang berbasis inklusi sosial memiliki kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Advokasi penting dilakukan di perpustakaan yang melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Hal ini dikarenakan dengan melakukan advokasi, program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang dilaksanakan di perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Karena dalam pelaksanaannya kegiatan ini mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, lembaga dan masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh Ilmi & Husna (2019).

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun (2023) dijelaskan bahwa advokasi adalah salah satu bentuk komunikasi persuasif yang bertujuan untuk memengaruhi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Hanya saja, dalam melakukan advokasi, dukungan yang diberikan tidak hanya berupa pengaruh namun juga berupa dana atau sumber daya seperti yang disampaikan oleh Alamsyah, dkk (2022). Terdapat langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan advokasi yang disebutkan oleh Ilmi & Husna (2019), antara lain: merumuskan tujuan advokasi, mengidentifikasi sasaran advokasi, membuat pesan advokasi dan menyusun rencana kerja advokasi. Ilmi & Husna (2019) juga menjelaskan bahwa advokasi merupakan upaya untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan kegiatan di perpustakaan

Dalam melakukan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, terdapat lima strategi yang dapat dilakukan. Lima strategi tersebut dijelaskan dalam Buku Pedoman Replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial oleh Perpustakaan Nasional (2023), antara lain: membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses transformasi perpustakaan, menyebarluaskan informasi tentang transformasi perpustakaan, melakukan kerja sama dengan lembaga lain serta memperlihatkan hasil positif dari transformasi perpustakaan kepada masyarakat. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah program yang diinisiasi oleh Perpustakaan Nasional sejak tahun 2018 (Pratiwi, 2020). Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2023 adalah peningkatan peran dan fungsi perpustakaan yang melibatkan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas hidup serta memberikan hasil positif untuk masyarakat, Tania (2023) menjelaskan bahwa perpustakaan yang telah bertransformasi dapat mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan. Kegiatan yang ada di perpustakaan merupakan kegiatan yang dapat mendorong kesejahteraan berdasarkan aspirasi masyarakat. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, bimbingan belajar dan kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat (Bengi MS & Masruri, 2023) karena Perpustakaan yang memiliki konsep inklusi sosial sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Yuliasih & Rachmatullah, 2025)

Untuk mendukung berjalannya kegiatan yang ada di perpustakaan terkait program perpustakaan berbasis inklusi sosial dibutuhkan kerja sama yang baik antara perpustakaan dengan masyarakat karena perpustakaan dapat menjadi tempat berkegiatan dan berkarya

masyarakat (Mahdi, 2020). Dalam Buku Pedoman Replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (2023) dijelaskan bahwa kerja sama dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap perpustakaan. Kerja sama juga dilakukan perpustakaan dengan lembaga lain dalam upaya untuk memperluas jangkauan perpustakaan terhadap masyarakat. Menurut Tarigan & Batubara (2023) kerja sama ini dapat dengan instansi pemerintah, pelaku usaha komersial atau organisasi masyarakat. Kerja sama dapat terjalin apabila ada faktor-faktor yang mendukung, menurut Fitri et al., (2023), hal yang dapat mendukung kerja sama antara lain: kedua belah pihak saling mengakui dan memahami kemampuan masing-masing; kedua belah pihak memahami dan mengerti adanya masalah yang akan dihadapi; terdapat komunikasi antara kedua belah pihak; pihak yang bekerjasama mengertai kelemahan orang lain; terdapat koordinasi yang baik, terdapat keterbukaan dan kepercayaan serta melibatkan orang lain.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Pasal 1, dijelaskan bahwa perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi. Mahdi (2020) menjelaskan bahwa tugas pokok perpustakaan antara lain menyediakan, mengolah, memelihara dan mendayagunakan koleksi bahan pustaka, menyediakan sarana pemanfaatannya dan melayani masyarakat pengguna yang membutuhkan informasi dan bahan bacaan. Selanjutnya konsep inklusi sosial yang ada di perpustakaan umum haruslah terjalin kerja sama yang baik antara perpustakaan dengan masyarakat karena perpustakaan menjadi pusat aktivitas masyarakat. Terdapat tiga konsep yang inklusi sosial di perpustakaan umum menurut Mahdi, antara lain: terdapat kegiatan pemberdayaan masyarakat, hak mendapatkan layanan perpustakaan secara menyeluruh, aksesibilitas informasi perpustakaan.

METODE

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah dimana peneliti menjadi instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara gabungan. Dalam penelitian ini informan kunci dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan beberapa kriteria. Kriteria tersebut meliputi: pustakawan yang terlibat dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; pustakawan mendapatkan surat rekomendasi dari Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan; pustakawan yang telah terlibat dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial minimal tiga kali; masyarakat Kabupaten Magetan yang terlibat langsung minimal sebanyak lima kali. Adapun informan dalam penelitian ini adalah dua orang pustakawan dan tiga orang masyarakat.

Teknik pengumpulan data menggunakan cara yang disampaikan oleh Sugiyono (2016) yaitu dengan observasi partisipatif aktif dimana peneliti ikut terlibat dalam kegiatan advokasi pada program TBIS, wawancara semiterstruktur dilakukan dengan berpedoman pada Pedoman Replikasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, serta dokumentasi berupa foto-foto kegiatan dan dokumen berupa piagam penghargaan dari kegiatan program TPBIS. Teknik analisis data menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2016) terdapat tiga langkah yaitu melakukan reduksi data, penyajian data dan penarikan

kesimpulan. Lokasi penelitian berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dan Dusun Singolangu Kabupaten Magetan yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai Juli 2024. Objek dari penelitian ini adalah strategi advokasi pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial menjadi program yang dicetuskan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang salah satu tujuannya adalah memberdayakan masyarakat. Perpustakaan daerah dapat menjadi sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan status sosial dari masyarakat. Adanya konsep inklusi sosial di perpustakaan daerah adalah sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat (Yuliasih & Rachmatullah, 2025). Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dimulai dengan adanya kegiatan pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan yang ada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan kini telah menunjukkan hasil positif. Hasil positif tersebut tidak lepas dari usaha Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam melakukan advokasi. Advokasi dilakukan dengan pihak-pihak yang dapat mendukung berjalannya program ini karena Ilmi & Husna (2019) menyampaikan bahwa sasaran advokasi adalah seseorang atau lembaga yang memiliki kewenangan yang dibutuhkan perpustakaan untuk mencapai tujuan.

Strategi advokasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dianalisis sebagai berikut.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan telah melaksanakan strategi advokasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meliputi lima poin utama berdasarkan Buku Pedoman Replikasi Transformasi Perpustakaan Nasional yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional (2023), antara lain membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses transformasi perpustakaan, menyebarluaskan informasi tentang transformasi perpustakaan, melakukan kerja sama dengan lembaga lain serta memperlihatkan hasil positif dari transformasi perpustakaan. Adapun uraiannya dijabarkan sebagai berikut:

1. Membangun komunikasi efektif dengan masyarakat

Dalam melakukan advokasi, komunikasi yang efektif dengan masyarakat perlu dilakukan. (Ilmi & Husna, 2019) menjelaskan bahwa salah satu rencana kerja dalam melakukan advokasi adalah melakukan lobi, dimana perpustakaan mempengaruhi orang lain dengan tujuan tertentu. Dalam konteks ini dalam tujuan untuk mendukung program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial supaya dapat berjalan dengan baik. Komunikasi yang efektif dibangun antara perpustakaan dengan masyarakat supaya juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat perpustakaan serta untuk memperjelas tujuan dari transformasi perpustakaan (Perpustakaan Nasional, 2023). Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini

“Dinas Arpus telah melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu sasaran

implementasi dari program TPBIS” – (Bunga, wawancara 26 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut disampaikan bahwa komunikasi yang efektif dibangun antara perpustakaan dengan masyarakat karena masyarakat adalah sasaran dari pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Berdasarkan hasil wawancara, adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam membangun komunikasi yang efektif adalah dengan cara sebagai berikut.

- a. Menginformasikan secara langsung kepada masyarakat
Informasi terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial disampaikan secara langsung kepada masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan. Informasi terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial juga disampaikan kepada masyarakat yang ada di area public dengan metode mulut ke mulut.
- b. Melakukan sosialisasi
Ketika ada kegiatan yang mendatangkan masyarakat di perpustakaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan melakukan sosialisasi terkait program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Informasi yang disampaikan mulai dari implementasi hingga hasil positif yang ada dari program tersebut.
- c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada perpustakaan desa/kelurahan
Karena perpustakaan desa/kelurahan adalah perpanjangan tangan dari perpustakaan daerah, maka Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pengelola perpustakaan desa/kelurahan.
- d. Melakukan visitasi ke desa/kelurahan
Berdasarkan hasil observasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan menginformasikan kepada pemerintah desa yang sedang dikunjungi terkait fasilitas yang ada di perpustakaan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, kegiatan yang ada di perpustakaan serta terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- e. Memberikan dukungan kepada masyarakat
Perpustakaan umum merupakan lembaga penyedia informasi dan sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan (Mahdi, 2020). Disini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Umum Kabupaten Magetan berusaha untuk dapat merangkul seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan transformasi perpustakaan. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan memberikan dukungan kepada masyarakat berupa motivasi. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“...Diharapkan dengan adanya kegiatan transformasi perpustakaan masyarakat yang memiliki keahlian lain dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan tambahan...Kami memberikan support untuk teman-teman disabilitas supaya mereka

percaya diri dan dapat menjalani hidup seperti teman-teman yang lain” - Budi (wawancara 21 Maret 2024)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut motivasi yang diberikan adalah berupa dorongan *support* untuk masyarakat disabilitas supaya tetap semangat dalam menjalani hidup dan tidak merasa minder dengan orang lain. Hal tersebut dikarenakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan bentuk pendekatan layanan perpustakaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui perpustakaan yang memberdayakan masyarakat (Rachman dkk., 2019). Sehingga dengan adanya dukungan dari perpustakaan kepada masyarakat disabilitas dapat sama-sama meningkatkan pemberdayaan untuk seluruh masyarakat tanpa membedakan kondisi masyarakat itu sendiri.

f. Membuat grup WhatsApp Komunitas Literasi

Grup WhatsApp Komunitas Literasi dibuat untuk memudahkan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam memberikan informasi-informasi terkait kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial kepada masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut.

“Kalau lewat wa kan lebih cepat nyampe (informasinya) soalnya kan semua orang punya wa” – Melati (wawancara: 19 Maret 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut dengan menggunakan WhatsApp, informasi yang ada di dapat dengan mudah didapatkan oleh masyarakat.

2. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan transformasi perpustakaan

Masyarakat perlu dilibatkan dalam kegiatan transformasi perpustakaan, seperti yang telah disampaikan Tania (2023) bahwa perpustakaan yang bertransformasi dapat mengembangkan ilmu pengetahuan masyarakat dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan kegiatan. Dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan transformasi perpustakaan, masyarakat dapat memberikan saran dan masukan mengenai apa saja yang diperlukan perpustakaan sehingga perpustakaan dapat memberikan layanan lebih baik lagi (Perpustakaan Nasional, 2023). Dari masyarakat yang memberikan saran dan masukan kepada perpustakaan, perpustakaan dapat mewujudkan pelibatan masyarakat ini dalam bentuk kegiatan. Bengi MS & Masruri (2023) menjelaskan bentuk pelibatan masyarakat yang diadakan dapat berupa kegiatan yang mengarah pada program pemberdayaan seperti pelatihan, bimbingan belajar serta kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan masyarakat.

Bentuk pelibatan masyarakat yang dilaksanakan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan juga berupa dalam bentuk kegiatan. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara.

“Bentuk pelibatan masyarakat adalah dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dapat mensupport dan secara ekonomi dan secara sumber daya manusia.” – (Budi, wawancara pada tanggal 21 Maret 2024).

Karena bentuk pelibatan masyarakat yang dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan, maka sumber daya manusia yang dimaksud adalah narasumber dari kegiatan dan peserta yang mengikuti kegiatan tersebut. Peserta dalam kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dibedakan berdasarkan usia, antara lain:

a. Usia anak-anak

Kegiatan yang dilaksanakan untuk usia anak-anak antara lain adalah kelas-kelas seperti kelas komputer, kelas tari, kelas menggambar, kelas Bahasa Inggris, kelas Bahasa Jawa dan kelas Bahasa Jepang.

b. Usia remaja

Untuk masyarakat usia remaja, jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka seperti kegiatan membuat pupuk kompos, pelatihan fiber optic, dan lain-lain.

c. Untuk ibu-ibu dan disabilitas

Kegiatan untuk ibu-ibu dan disabilitas adalah kegiatan yang dapat meningkatkan keterampilan serta dapat memberikan penghasilan tambahan untuk mereka. Jenis kegiatannya seperti pelatihan menyulam, pelatihan membuat buket, pelatihan merajut, kemudian pelatihan internet untuk marketing online, dan lain-lain.



Gambar 1 Pelatihan Menyulam Untuk Disabilitas

Sumber: Dokumentasi Pribadi

3. Menyebarluaskan informasi tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

Ilmi & Husna (2019) menyebutkan bahwa salah satu rencana kerja advokasi adalah melakukan promosi. Promosi dilakukan perpustakaan untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Informasi terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial disebarkan kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan perpustakaan harus berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi karena dengan menyebarluaskan informasi maka perpustakaan dapat memberikan penjelasan informasi yang jelas mengenai tujuan transformasi perpustakaan serta manfaat untuk masyarakat sendiri (Perpustakaan Nasional; 2023). Berdasarkan hasil wawancara, cara yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan untuk menyebarluaskan informasi adalah menggunakan media sosial Instagram, pamflet yang ditempelkan di pintu masuk perpustakaan, kemudian penyampaian informasi ketika kegiatan perpustakaan keliling serta ketika melakukan kegiatan kunjungan ke desa/kelurahan.

4. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain

Dalam melakukan advokasi, kerja sama perlu dilakukan oleh perpustakaan, kerja sama atau kemitraan ini untuk menjalin hubungan dan juga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak (Ilmi & Husna, 2019). Kerja sama dilakukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dengan pihak-pihak yang mendukung dan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung di perpustakaan. Mahdi (2020) menjelaskan konsep inklusi sosial di perpustakaan umum adalah terjalannya kerja sama yang baik antara perpustakaan dengan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“Dinas Arpus sudah melakukan Kerja sama dengan Lembaga antara lain LKBH IAIN Ponorogo yang memberikan informasi terkait dengan hukum dan perundang - undangan, Kerja sama dengan Perpustakaan desa/kelurahan, sekolah, Dinas Kominfo, Pemilik home industry kerajinan maupun makanan, Relawan TIK, Ahli Gizi, Penyuluh Pertanian dll”. (Bunga, wawancara pada tanggal 26 Februari 2024).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut disampaikan bahwa kerja sama dengan pihak lain telah dijalin oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Adanya kerja sama dengan mitra dapat memudahkan berjalannya kegiatan serta masyarakat yang mengikuti kegiatan juga dapat menerima hasil dengan maksimal. Hanya saja kerja sama yang terjalin antara perpustakaan dengan pihak lain belum terdapat surat perjanjian kerja sama. Alasan tersebut disampaikan dalam kutipan wawancara berikut ini.

“...Sementara mungkin ini dari obrolan lisan sampai terlaksana kegiatan kalau memang antara kedua belah pihak dapat dan terlaksana kegiatan maka nanti kalau terus dan berlanjut kita buat MOU.” – (Budi, wawancara pada tanggal 21 Maret 2024)

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa kegiatan yang melibatkan kerja sama dengan pihak lain dilakukan dengan obrolan antara kedua belah pihak terlebih dahulu. Surat perjanjian kerja sama akan dibuat apabila kegiatan dilakukan secara rutin. Menurut Fitri, dkk (2023) kerja sama dapat terjalin apabila terdapat koordinasi yang baik antara kedua belah pihak.

5. Memperlihatkan hasil positif dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial
Implementasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan telah memperlihatkan hasil yang positif. Hasil positif ini telah disampaikan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Penyampain ini bertujuan supaya masyarakat mengetahui bahwa program transformasi perpustakaan ini benar dalam memberikan manfaat kepada masyarakat. Ilmi & Husna (2019) juga menjelaskan bahwa salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan advokasi adalah membuat pesan advokasi, dimana perpustakaan menyampaikan pentingnya perpustakaan kepada masyarakat. Hasil positif tersebut antara lain:
 - a. Mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional
Penghargaan dari Perpustakaan Nasional diberikan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan sebagai pelaksana

inovasi layanan perpustakaan digital terbaik pada tahun 2023. Sebagai Dinas kearsipan dan perpustakaan kabupaten /kota terbaik pelaksanana program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2020 dan 2021. Kabupaten/kota terbaik pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di tahun 2020.

- b. Peningkatan penjualan dari masyarakat
Salah satu kegiatan yang pernah diadakan oleh perpustakaan adalah *marketing digital*, salah satu masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut kini penjualan produk olahan susu milik mereka mengalami peningkatan setelah menerapkan hasil dari pelatihan yang diikuti di perpustakaan.
- c. Peningkatan jumlah kunjungan di perpustakaan
Adanya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan. Kunjungan ini adalah dari anak-anak usia Taman Kanak-Kanak dan juga Sekolah Dasar.

2. Kendala

Dalam melaksanakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tentu saja terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Membangun komunikasi efektif dengan masyarakat

Kendala yang dialami dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat disampaikan dalam kutipan wawancara berikut.

“Belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat.” – Bunga (Wawancara: 26 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan tersebut kendala yang dialami adalah belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Selain itu kendala yang dirasakan adalah adanya perbedaan kepentingan atau kesibukan antara masyarakat dengan perpustakaan. Berdasarkan hasil wawancara solusi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam mengatasi kendala tersebut adalah dengan melakukan sosialisasi secara langsung ketika melakukan perpustakaan keliling, kemudian membuat leaflet, mendekatkan diri ke masyarakat serta memaksimalkan media sosial untuk menyampaikan informasi.

2. Melibatkan masyarakat dalam kegiatan transformasi perpustakaan

Tania (2023) menyampaikan bahwa perpustakaan yang telah bertransformasi berbasis inklusi sosial dapat mengembangkan wawasan masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat. Kendala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam melibatkan masyarakat terdapat dalam kutipan wawancara berikut.

“Kendala yang dihadapi kurangnya narasumber kegiatan dan anggaran” – Bunga (wawancara: 26 Februari 2024).

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut disampaikan bahwa kendalanya adalah kurangnya narasumber dan anggaran. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang dapat dijadikan narasumber serta menyebarluaskan informasi lebih masif lagi.

3. Menyebarluaskan informasi tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

Dalam menyebarluaskan informasi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan tidak mengalami kendala dikarenakan dimudahkan adanya media sosial.

4. Melakukan kerja sama dengan lembaga lain

Selama melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan tidak mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan melakukan koordinasi yang baik dengan mitra.

5. Memperlihatkan hasil positif dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial

Dalam memperlihatkan hasil positif dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan mengalami kendala seperti dalam kutipan berikut.

*“Kendala yang dirasakan yaitu keterbatasan sumber daya pengelola program TPBIS di Dinas Arpus, karena banyak kegiatan yang harus dilakukan juga dalam melaksanakan tugas dan fungsi perpustakaan sebagai Organisasi Perangkat daerah di bidang layanan publik. ”
(Bunga, wawancara:pada tanggal 26 Februari 2024).*

Berdasarkan kutipan wawancara berikut disampaikan bahwa kendala dari memperlihatkan hasil positif adalah kurangnya sumber daya manusia yang menangani program tersebut. Solusi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam menghadapi kendala tersebut adalah dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk memaksimalkan program ini.

KSEIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menjalankan strategi advokasi program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan sudah baik dalam melakukan advokasi karena telah sesuai dengan yang ada dalam Buku Pedoman Replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.

Implementasi strategi advokasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan, dapat disimpulkan ke dalam beberapa poin berikut: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan terus berupaya membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Komunikasi dibangun dengan masyarakat karena untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perpustakaan dan memperjelas tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Adapun cara yang dilakukan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan dalam membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat adalah dengan menginformasikan secara langsung kepada masyarakat, melakukan sosialisasi, melakukan sosialisasi dan bimbingan teknik ke perpustakaan desa/kelurahan, melakukan visitasi ke desa/kelurahan, memberikan dukungan kepada masyarakat berupa motivasi serta dengan membuat grup WhatsApp Komunitas Literasi.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan juga melakukan pelibatan masyarakat dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adalah sasaran utama dari program ini. Masyarakat terlibat dalam kegiatan sebagai narasumber ataupun sebagai peserta dari kegiatan tersebut. Kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan yang dibuat oleh perpustakaan dan atas saran serta masukan dari masyarakat yang kemudian direalisasikan oleh perpustakaan. Bentuk pelibatan masyarakat yang dilakukan adalah dalam bentuk kegiatan yang dapat mengembangkan keterampilan masyarakat. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan jenis kegiatan berdasarkan usia peserta, yaitu untuk anak-anak, remaja serta ibu-ibu dan disabilitas.

Informasi terkait transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial perlu disampaikan kepada masyarakat supaya masyarakat mendapatkan informasi terkait tujuan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Cara yang dilakukan dalam menyebarluaskan informasi adalah menggunakan media sosial Instagram, pamflet yang ditempelkan di pintu masuk perpustakaan, kemudian penyampaian informasi ketika kegiatan perpustakaan keliling serta ketika melakukan kegiatan kunjungan ke desa/kelurahan.

Demi berjalannya serta untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan menjalin kerja sama dengan lembaga lain. Hanya saja dalam menjalin kerja sama dengan pihak lain, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan belum memiliki surat perjanjian kerja sama. Kerja sama dijalin dengan obrolan dan kesepakatan bersama.

Hingga pada akhirnya seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan ini memberikan hasil positif, baik dari masyarakat atau dari perpustakaan sendiri. Keberhasilan perpustakaan dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini juga perlu ditunjukkan kepada masyarakat supaya masyarakat benar-benar mengetahui manfaat dari program ini serta peningkatan kebutuhan akan perpustakaan. Perpustakaan mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional, terdapat masyarakat yang meningkat penjualan produknya. Kunjungan di perpustakaan juga mengalami peningkatan.

Kendala yang dihadapi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Magetan adalah kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini. Waktu perpustakaan dan masyarakat yang tidak sama ketika akan melakukan kegiatan, jarak masyarakat dan perpustakaan yang jauh serta belum menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Magetan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Maziyah, S., & Indrahti, S. (2022). Advokasi pembangunan jejaring dan kemitraan pada perpustakaan di Jawa Tengah. *Harmoni*, 6(12), 205–210. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/harmoni/article/view/50823>
- Bengi MS, N. I., & Masruri, A. (2023). Strategi dan Pengembangan Perpustakaan Berbasis

- Inklusi Sosial dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Tumpi Baru Kabupaten Aceh Tengah. *LIBRARIA: Jurnal Perpustakaan*, 11(2), 255. <https://doi.org/10.21043/libraria.v11i2.18092>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Badan Pemeriksa Keuangan <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39968/uu-no-43-tahun-2007>
- Fitri, A., Alfahira, N., & Hayati, F. (2023). Membangun Kerja Sama Tim dalam Perilaku Organisasi. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, 2(2), 103–109. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v2i2.252>
- Ilmi, A. R., & Husna, J. (2019). STRATEGI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DESA OLEH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN DEMAK DENGAN MITRA KERJA PERPUSKERU (Studi Kasus: Perpustakaan Desa Kenanga, Perpustakaan Desa Melati dan Perpustakaan Desa Nusa Indah). *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 6(3), 131–140. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/23140>
- Mahdi, R. (2020). Perpustakaan Umum Berbasis Inklusi Sosial: Apa dan Bagaimana Penerapannya? (Sebuah Kajian Literatur). *Fihris: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi*, 15(2), 201. <https://doi.org/10.14421/fhrs.2020.152.201-215>
- Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No.3 Tahun 2023. (2023). *Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia No 3 Tahun 2023 Tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. 1–15.
- Perpustakaan Nasional. (2023). *Pedoman Replikasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial*. Perpustakaan Nasional. <https://khastara.perpusnas.go.id/landing/detail/1579484>
- Pratiwi, E. (2020). *Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial: Upaya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dalam Mewujudkan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Indonesia*.
- Rachman, R. A., Sugiana, D., & Rohanda, H. (2019). Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Strategi Sukses Transformasi Perpustakaan Desa Berbasis Inklusi Sosial untuk Masyarakat Sejahtera (Studi Pada Perpustakaan Desa Gampingan Gemar Membaca Malang). *Seminar Nasional MACOM III Universitas Padjadjaran 2019 “Communication and Information Beyond Boundaries” Strategi*, Februari, 907–918.
- Sugiyono, P. D. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif* (12th ed.). Alfabeta.
- Tania, Y. E. (2023). Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. *JIPIS: Jurnal Ilmu Perpustakaan Dan Informasi Islam*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31958/jipis.v2i1.8602>
- Tarigan, T. B., & Batubara, A. K. (2023). Peran Perpustakaan Daerah Kabupaten Karo Dalam Pemanfaatan Program Literasi Inklusi Sosial. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 441–450. <https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.475>
- Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Bintang Pustaka Madani.

- Wiranda, M. A., Agustini, N., & Anwar, R. K. (2022). Strategi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. *Libria*, 14(2), 98–121.
- Yuliasih, Y., & Rachmatullah, R. (2025). *Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) Berdasarkan Perspektif Pendidikan Moderasi Beragama*. 3, 234–250. <https://doi.org/10.62083/h9jdsx06>